



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Target Fondasi Kuat di Tahun Pertama

Keberhasilan gubernur bukan berdasarkan opini publik, melainkan terealisasinya program pembangunan yang memenuhi kebutuhan warga. Untuk itu, butuh fondasi perencanaan yang kuat di tahun pertama dan kejelasan tahapan realisasi program hingga tahun kelima. Perbaikan sistem menjadi tujuan utama.

Hari ini, Selasa (16/10/2018), tepat satu tahun Ibu Kota di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Senin siang kemarin, selama lebih kurang 1,5 jam, Anies berbagi kisah kerjanya bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Anies di ruang kerja gubernur di Balai Rung, Balai Kota DKI Jakarta. Ada tiga hal utama yang dibahas, yaitu terkait program unggulan rumah DP Rp 0, transportasi terintegrasi, dan penanganan banjir serta penataan sungai. Laporan lengkap wawancara dapat dibaca di *Kompas.id*, hari ini.

Evaluasi setahun ini, apa pencapaian dan kendalanya?

Hal terpenting dalam fase pertama itu adalah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seorang gubernur diberi tugas untuk memimpin Jakarta. Dia dinilai berhasil atau tidaknya bukan berdasarkan opini-opini saja, melainkan atas rencana yang dia bikin sendiri.

Masalah di Jakarta akan selalu ada, tetapi yang tidak boleh itu adalah masalah berulang. Oleh karena itu, harus ketemu mitigasinya. Saya pegangnya janji kampanye, lalu diterjemahkan dalam RPJMD. Lalu siapakan lima tahun, tiap tahun kami kerjakan apa.

Permasalahannya, siklus anggaran sama siklus jabatan ini tidak sinkron. Saya dilantik pada 16 Oktober, kami mencoba menyalasi dengan hal-hal yang tidak membutuhkan APBD, atau kita bisa gunakan APBD dengan ruang yang ada.

Saya sudah membangun fondasi awalnya. Fondasi awalnya adalah cara melihat masalah solusinya itu dibuat struktur yang benar sehingga tahun-tahun ke depan kita bekerja dalam arah yang benar.

Dari 23 janji kerja yang tertuang di RPJMD itu, poin mana saja yang sudah terealisasi?

Semuanya sudah, tetapi perkembangannya berbeda-beda. Target rumah DP Rp 0 selama 5 tahun sebanyak 14.564 unit di 23 lokasi. Ini APBD-Perubahan saja baru bisa disepakati bulan lalu. Alhamdulillah kita bisa bangun 780 unit. Sisanya dikejar di APBD 2019 dan selanjutnya.

DP Rp 0 harapannya tidak putus di tengah jalan. Apa rencananya supaya program berlanjut meskipun gubernur berganti?

Saya senang sekali, di program ini BUMN banyak yang tertarik terlibat. Banyak orang yang mau membangun, tetapi mereka tidak mau kerumitan mencari pembeli. Karena sebagian bukanlah pengembang properti. Kami lewat program ini punya orang yang siap beli. Ini seperti *supply and demand* bertemu. Kami mengorganisasi *supply*-nya dalam artian *buyer*, sementara banyak yang terlibat mau membangun rumahnya.

Sudah ada tiga BUMN besar yang berminat untuk terlibat. Mereka bisa bangun banyak sekali. Insya Allah ini akan jadi satu model berkelanjutan.

Tidak kekurangan lahan, apalagi kalau sudah jadi hunian vertikal. Saya juga sudah sampaikan lokasi bisa di dalam *master plan* transportasi umum massal kita (TOD). Supaya kalau bangun dekat dengan stasiun, gedung, bus transjakarta, jadi tidak perlu punya mobil atau sepeda motor.

Bagaimana dengan masyarakat berpenghasilan rendah?

Sesuai RPJMD 2018-2022, opsinya bagi mereka yang bergaji di bawah Rp 4 juta itu adalah rumah susun sederhana sewa. Tapi, kami ingin membangun rusunawa dengan opsi mereka bisa memiliki setelah dipakai 20 tahun. Kalau mereka bayar rutin dan merawat unit rusunawa dengan baik, setelah 20 tahun mereka bisa memiliki.

Paradigma yang saya mau bawa itu adalah kami ingin hadirkan keadilan sosial di Jakarta. Penata kota bukan masalah tata ruang saja, melainkan tentang mengelola aspirasi manusia. Untuk itu, juga ada program penataan kampung dengan program *community action plan* (CAP). Ini proses yang panjang dan lama karena mendekatinya tidak mudah, harus ada diskusi, dialog, aspirasinya apa.

Apa kabar penataan transportasi publik terintegrasi?

Soal lalu lintas dan transportasi umum, kami coba pengintegrasian dengan eksperimen kami namai OK OTrip. Saya bersyukur sekali, 11 operator kecil sudah mau kerja bersama.

Saya ingin membuat sistem di mana operator bisa *sustainable*. Orang yang bekerja di situ merasakan kesejahteraan, warga yang ada di situ merasakan kendaraan umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Lalu, pemprov siapkan anggaran yang cukup untuk menutup selisih karena tidak mungkin angkutan umum akan bisa menutup semua biaya selisih dan pemasukan. Kami mau operator *fair*, transparan dalam penghitungan, kami pun bisa nyaman alokasikan anggaran.

Ini adalah fase awal, kalau

yang kecil sudah mau gabung, yang menengah ke atas akan ikut. Setelah eksperimen ini, saya juga mengganti nama program jadi Jak Lingko yang berarti sekuat terintegrasi seperti sistem saluran air yang saling tersambung (kearifan lokal dari Nusa Tenggara Timur). Ini sekaligus memberikan pesan bahwa semuanya harus *nyambung* antara angkutan massal berbasis rel dan bus serta angkutan kota.

Terobosan apa untuk mencapai target yang diinginkan?

Insya Allah Anies akan menepati janji. Saya tidak menyangka Jakarta. Ini penting untuk pasukan saya di bawah. Jadi, saya berharap Insya Allah kami tunaikan, tapi perlu waktu. Karena itu, *planning* menjadi penting. Kalau perencanaan *benar*, Insya Allah eksekusinya jalan. Harapannya, nanti kami genjot dengan fiskal yang cukup untuk program-program yang 2018 tidak bisa terlaksanakan karena belum disediakan kantongnya.

Apakah soal politisasi menjadi kendala pembangunan?

Tidak. Saya berada di wilayah publik, apa pun yang saya lakukan dan katakan akan jadi perbincangan, akan banyak interpretasi. Kami tidak bisa salahkan orang interpretasi apa pun. Buat saya itu hal normal dan membantu untuk tambahan *feedback* persepsi seperti apa. Karena saya rencana menyelesaikan itu di ujung RPJMD, bukan apa kata orang bilang.

Soal pencabutan izin 13 pulau reklamasi, soal empat pulau yang sudah terbangun bagaimana pemanfaatannya?

Kami ingin jalankan sesuai ketentuan. Saya memperlakukan rencana reklamasi sebagai sebuah proses teknokratik bahwa

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Target Fondasi Kuat di Tahun Pertama

pernah ada rencana melalui Perpres Nomor 52 Tahun 1995. Saya sebagai orang yang mendapat mandat perpres melihat rencana reklamasi itu baik. Di situ diamankan untuk membuat badan, saya buat badan. Badan ini bertugas me-review.

Setelah di-review, ternyata punya izin, tetapi tidak jalankan kewajiban. Jadi ketika saya putuskan cabut (izin) jangan protes sama saya. Sekarang tim pesisir sedang membuat rencana induk tentang pesisir Jakarta.

Saya ingin, kami sudah ada bayangan pesisir Jakarta seperti apa. Dari rencana induk akan diturunkan ke dalam pasal-pasal untuk revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pemanfaatan pulau baru bisa dikerjakan setelah ada aturan itu. Mudah-mudahan akhir tahun ini rencana induknya selesai.

Cara kami selesaikan ini juga kirimkan pesan pada dunia usa-

ha bahwa di Jakarta, Anda ikuti aturan, Anda akan aman.

Banjir masih jadi ancaman? Bagaimana penanggulangannya?

Saya rasa masih, selama waduk di atas belum selesai semua. Untuk penanganan banjir di sungai-sungai di Jakarta, kami harapkan lebih banyak lagi waduk dan embung di Bogor. Karena mengurangi volume air turun dari Bogor penting.

Sungai akan kami lakukan naturalisasi, yaitu membuat sungai itu hidup sebagai ekosistem bukan sebagai kanal mengalirkan air ke laut. Dalam program naturalisasi, kami tetap akan mempertahankan kelokan-kelokan. Ada kemungkinan sahur-an beton akan dibongkar, tetapi tidak sekarang, semua bertahap.

Bagaimana dengan pelayanan publik secara umum?

Itulah mengapa pentingnya membuat sistem. Sekarang saya sedang membuat tata kelola pemerintahan. Tengah diproses ba-

gaimana seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus kerja benar dihubungkan dengan kinerja capaian. Jadi, bukan semata-mata berapa jam bekerja. Capaian itu isinya terjemahan RPJMD. Itu kerja teknokratik, bukan kerja politikal.

Saya memperbaiki sistem supaya efeknya sistemik. Kalau sistem berjalan, gubernur *no longer the hero*. Sistem sudah bisa selesaikan permasalahan di DKI, siapa pun pemimpinnya.

(DIAN DEWI PURNAMASARI/
ANDY RIZA HIDAYAT/
NELI TRIANA)